

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh perorangan dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 (UU No 20 Tahun 2008). Pada periode 1997 – 1998 ketika terjadi krisis di Indonesia, UMKM terbukti mampu berdiri kokoh dan tidak terpengaruh terhadap krisis tersebut (Bank Indonesia, 2015). Berdasarkan data BPS, tenaga kerja yang mampu diserap oleh UMKM pasca krisis ekonomi sebesar 85 juta - 107 juta sampai tahun 2012. Selain itu, Pertumbuhan UMKM juga menjadi salah satu hal penting dalam kebijakan pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia sebanyak 119,5 juta tenaga kerja sampai tahun 2019.

Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM) memiliki perbedaan sesuai dengan skala usaha, perspektif usaha serta aset dan omsetnya. Menurut Bank Dunia, perbedaan antar pelaku usaha UMKM sesuai skalanya dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu: Usaha Mikro (10 orang karyawan), Usaha Kecil (30 orang karyawan), dan Usaha Menengah (karyawan hingga 300 orang). UMKM juga diklasifikasikan ke dalam empat kelompok berdasarkan perspektif usahanya, yaitu: UMKM sektor informal (pedagang kaki lima), UMKM Mikro (UMKM sifat pengrajin namun kurang dalam kewirausahaan), Usaha Kecil Dinamis (UMKM mampu berwirausaha dengan bekerjasama subkontrak dan ekspor) dan *Fast Moving Enterprise* (UMKM mampu berwirausaha yang cakap dan siap bertransformasi menjadi usaha besar).

Kriteria UMKM berdasarkan Aset dan Omset yang diperoleh disajikan pada Tabel 1

Tabel 1. Kriteria UMKM Berdasarkan Aset dan Omset

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Aset	Omset (pertahun)
Usaha Mikro	Maksimal Rp 50 juta	Maksimal Rp 300 juta
Usaha Kecil	>Rp50juta – Rp500 juta	>Rp300juta – Rp2,5miliar
Usaha Menengah	>Rp500 juta – Rp10 miliar	>Rp2,5 miliar-Rp50 miliar

Sumber : UU No 20 Tahun 2008

UMKM memiliki peranan penting dalam ekonomi nasional karena berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional terlihat dari banyaknya unit usaha pelaku UMKM di Indonesia sebanyak 65,4 juta unit berdasarkan data Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Tahun 2019. Pada tahun 2021 UMKM di Kota Bandar Lampung sebanyak 59.006 unit usaha. Usaha Mikro terbanyak ada di kecamatan Tanjung Karang Pusat, sedangkan yang paling sedikit ada di kecamatan Teluk Betung Timur. Usaha Kecil terbanyak ada di kecamatan Enggal, paling sedikit di Teluk Betung Utara. Selengkapnya jumlah unit usaha UMKM di tiap kecamatan kota Bandar Lampung disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Unit Usaha UMKM Kota Bandar Lampung

NO	Kecamatan	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Jumlah UMKM (unit)
1	Tanjung Karang Pusat	3.167	893	342	4.402
2	Tanjung Karang Timur	1.713	712	246	2.671
3	Tanjung Karang Barat	1.656	794	241	2.691
4	Kedaton	1.913	845	309	3.067
5	Rajabasa	1.709	714	270	2.693
6	Tanjung Senang	1.487	789	326	2.602
7	Sukarame	1.860	915	267	3.042
8	Sukabumi	1.514	676	316	2.506
9	Panjang	2.125	917	268	3.310
10	Teluk Betung Selatan	1.743	798	236	2.777
11	Teluk Betung Barat	1.562	654	220	2.436
12	Teluk Betung Utara	2.043	636	291	2.970

Tabel 2. (Lanjutan)

13	Kemiling	2.837	856	232	3.925
14	Teluk Betung Timur	1.405	788	301	2.494
15	Enggal	1.672	945	240	2.857
16	Bumi Waras	1.930	686	271	2.887
17	Way Halim	2.200	683	266	3.149
18	Kedamaian	1.857	732	287	2.876
19	Labuhan Ratu	2.121	826	257	3.204
20	Langkapura	1.465	721	261	2.447
	Jumlah	37.979	15.580	5.447	59.006

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, 2021

Pelaku UMKM telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia. UMKM sangat memiliki potensi pasar yang besar pada industri jasa keuangan, terutama bagi perbankan yang menyalurkan pembiayaan. Sekitar 60- 70% pelaku usaha UMKM belum memiliki akses dalam pembiayaan perbankan. Hal tersebut telah menyadarkan banyak pihak pembiayaan dalam memberikan porsi pendanaan lebih besar kepada bisnis skala mikro, kecil, dan menengah sehingga penyaluran kredit kepada UMKM mengalami pertumbuhan yang signifikan oleh perbankan.

Terdapat beberapa ketentuan dalam penyaluran kredit UMKM salah satunya syarat yang diberikan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk Koperasi dan UKM di Bandar Lampung yaitu melaporkan Laporan Keuangan selama 2 tahun terakhir yang memperoleh keuntungan. Hanim dan Noorman (2018) mengatakan terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam menjalankan UMKM yaitu permodalan yang disebabkan perbankan kurang mampu menjangkau hingga ke daerah pelosok dan terpencil. Kemudian administratif menjadi salah satu kendala yaitu UMKM mengelola/manajemen bisnis secara manual dan tradisional, terutama manajemen keuangan. Pengelola UMKM belum dapat memisahkan antara uang untuk keperluan operasional rumah tangga dan usaha. Selain kurangnya sumber daya manusia, akuntabilitas merupakan salah satu kendala dalam menjalankan UMKM yaitu kurangnya sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik (Hanim dan Noorman, 2018).

Laporan keuangan bertujuan sebagai sarana penyedia informasi terkait posisi keuangan dan kinerja keuangan yang bermanfaat bagi suatu entitas yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun. Pengguna laporan keuangan meliputi kreditor maupun investor sebagai penyedia sumber daya bagi entitas (DSAK IAI, 2016). Untuk memenuhi tujuannya, diperlukan adanya standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan mudah dipahami. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) membantu UMKM untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan dengan menerbitkan SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah) yang diberlakukan pada 1 Januari 2018. Pemberlakuan SAK EMKM disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia dan seiring perkembangan waktu dibutuhkan standar akuntansi lebih sederhana. Sebelumnya pada tahun 2009 DSAK IAI menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang akhirnya diterbitkan standar yang lebih sederhana yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM).

SAK EMKM berisi pengaturan akuntansi yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK ETAP karena transaksi yang diatur dalam SAK EMKM umum dilakukan oleh pelaku UMKM. Laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM terdiri dari laporan posisi keuangan akhir periode, laporan laba rugi selama periode dan catatan atas laporan keuangan. Pengukuran pada SAK EMKM menggunakan biaya historis dengan mencatat aset dan liabilitas sebesar biaya perolehannya. Meskipun SAK EMKM dikatakan sederhana, informasi dalam penyajian laporannya cukup andal serta diharapkan mempermudah pelaku usaha UMKM dalam penyusunan laporan keuangan sehingga akses dalam pendanaan usaha dipermudah oleh berbagai lembaga keuangan.

Pemerintah dalam rangka membantu UMKM di Bandar Lampung melakukan peningkatan dari sisi SDM agar kualitas UMKM meningkat dan melakukan pembiayaan terkait kelembagaan UMKM. Pembiayaan menggunakan beberapa syarat salah satunya laporan keuangan dimana pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung akan menerapkan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM jika memiliki pemahaman penerapan SAK EMKM, sehingga peneliti tertarik untuk

meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman penerapan SAK EMKM di Bandar Lampung.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Intan Adino (2019) yang di dalamnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman pelaku UMKM berdasarkan SAK EMKM yaitu sosialisasi, tingkat pendidikan, ukuran usaha, dan umur usaha. Hasil penelitian (Intan Adino, 2019) menyatakan bahwa sosialisasi, tingkat pendidikan, dan ukuran usaha berpengaruh terhadap pemahaman pelaku UMKM berdasarkan SAK EMKM. Namun berbeda dengan penelitian (Wardani dan Hartanto, 2022) tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tahun dalam melakukan analisis dan lokasi objek penelitian. Penelitian Intan Adino dilakukan pada tahun 2019 terhadap pelaku UMKM di Kota Pekanbaru sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 di kecamatan Tanjung Karang Pusat, dikarenakan jumlah UMKM di Kota Bandar Lampung terbanyak terdapat pada kecamatan Tanjung Karang Pusat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Penerapan SAK EMKM Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Tanjung Karang Pusat.”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi SAK EMKM berpengaruh terhadap pemahaman penerapan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM di kecamatan Tanjung Karang Pusat?
2. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman penerapan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM di kecamatan Tanjung Karang Pusat?
3. Apakah ukuran usaha berpengaruh terhadap pemahaman penerapan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM di kecamatan Tanjung Karang Pusat?
4. Apakah umur usaha berpengaruh terhadap pemahaman penerapan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM di kecamatan Tanjung Karang Pusat?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi SAK EMKM terhadap pemahaman penerapan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM di kecamatan Tanjung Karang Pusat.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari tingkat pendidikan terhadap pemahaman penerapan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM di kecamatan Tanjung Karang Pusat.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari ukuran usaha terhadap pemahaman penerapan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM di kecamatan Tanjung Karang Pusat.
4. Untuk mengetahui pengaruh dari umur usaha terhadap pemahaman penerapan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM di kecamatan Tanjung Karang Pusat.

1.4 Kontribusi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau berkontribusi untuk:

1. Bagi pendidikan dan Akademisi

Penelitian ini diharapkan sebagai sarana dalam menambah pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemahaman penerapan SAK EMKM.

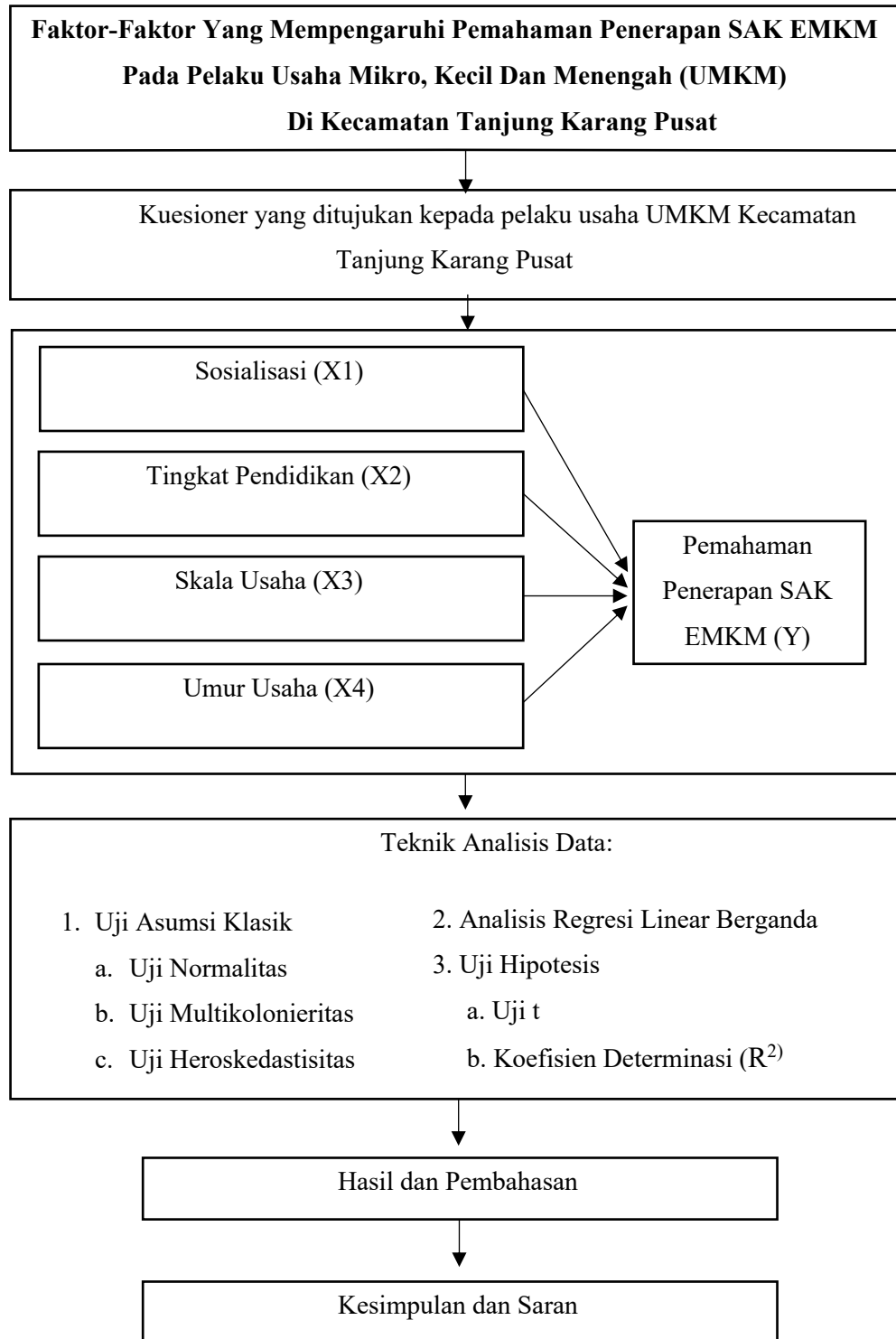
2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman penerapan SAK EMKM pada UMKM juga sebagai pengembangan dan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

3. Bagi UMKM

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan atau sebagai bahan masukan untuk mengetahui manfaat penerapan SAK EMKM pada UMKM, dan dapat memudahkan pelaku UMKM dalam penerapan SAK EMKM serta memahami akan pentingnya pembukuan sesuai dengan SAK EMKM untuk mengembangkan usahanya.

1.5 Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teori

2.1.1 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, pengertian Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha menengah adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria berdasarkan undang undang.
- b. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak/cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil dalam undang-undang.
- c. Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak/cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau penjualan tahunan yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok yaitu:

1. *Livelihood Activities*, yaitu UMKM sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, biasanya dikenal sebagai sektor informal, contohnya adalah pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise* yaitu UMKM yang memiliki sifat pengrajin namun belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise*, yaitu UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan serta mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise*, yaitu UMKM yang memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan tranformasi menjadi Usaha Besar (UB).

2.1.2 Pemahaman SAK EMKM

SAK EMKM disusun dan disahkan pada tahun 2016 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (DSAK IAI) dalam rangka membantu UMKM untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangannya. SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil dan menengah. Pengaturan akuntansi SAK EMKM lebih sederhana dibandingkan SAK ETAP dengan mengatur transaksi secara umum yang dilakukan oleh entitas mikro, kecil dan menengah. Dasar pengukuran SAK EMKM murni menggunakan biaya historis.

Laporan keuangan yang disajikan berdasarkan SAK EMKM minimum terdiri dari:

- a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode
- b. Laporan laba rugi selama periode
- c. Catatan atas laporan keuangan, yang berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan

Pemahaman SAK EMKM dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk menerapkan standar akuntansi agar memenuhi kewajiban pelaporan usaha. Pelaku usaha yang dibekali mengenai pemahaman ilmu akuntansi yang memadai akan meningkatkan keberhasilan dari implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada UMKM. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, pemahaman akuntansi ini dapat dinilai dari kecerdasan emosional dan minat atau perilaku belajar seseorang (Suprianto dan Harryoga, 2016).

2.1.3 Sosialisasi

Menurut pendapat Soerjono Soekanto (2017) pengertian sosialisasi ialah suatu proses sosial tempat seorang individu melakukan interaksi sosial juga mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku orang-orang di sekitarnya

Selain itu menurut Ritcher dalam Dewi, Yuniarta dan Wahyuni (2017) sosialisasi merupakan proses seseorang dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta sikap agar dapat berfungsi sebagai orang dewasa dan sebagai pemeran aktif suatu kedudukan atau peranan tertentu dalam masyarakat. Gunawan (2012) mendefinisikan sosialisasi merupakan proses dari penyampaian sesuatu

pesan untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat, perilaku baik langsung maupun tidak langsung oleh seseorang kepada orang lain.

Berdasarkan uraian definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sosialisasi merupakan proses pembentukan perilaku yang dilakukan seseorang dalam memberikan perubahan mengenai sikap, pengetahuan, dan keterampilan kepada seseorang agar dapat berperan aktif dalam masyarakat. Ketika pelaku UMKM belum memiliki pengetahuan mengenai manfaat penyusunan laporan keuangan secara menyeluruh, maka penyusunan laporan keuangan akan enggan dilaksanakan. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada pelaku UMKM mengenai manfaat yang didapat jika menyusun laporan keuangan. Sehingga hal tersebut membuat pelaku usaha terdorong untuk menyusun laporan keuangan dan berdasarkan SAK EMKM (Mutiarini dan Yudiantara, 2021)

2.1.4 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan menurut UU No. 20 Tahun 2003 merupakan suatu tahapan dalam pendidikan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik yang menuju pencapaian dan kemampuan yang dikembangkan. Tingkat pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar yaitu melandasi jenjang pendidikan menengah berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) serta bentuk lain yang sederajat, pendidikan menengah yaitu lanjutan pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum/kejuruan berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) serta bentuk lain yang sederajat, pendidikan tinggi merupakan jenjang setelah pendidikan menengah yang mencakup pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan meningkatkan kemampuan menyerap (termasuk kemampuan akuisisi, asimilasi, transformasi, dan eksploitasi) dari pengetahuan baru (Gray 2006; Van Hermert et al. 2011) dalam Wijaya (2019).

2.1.5 Skala Usaha

Menurut Holmes dan Nicholls (1998) dalam Arizali (2013), Skala usaha merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam mengelola usahanya dengan

melihat total aset, melihat berapa jumlah karyawan yang dipekerjakan dan berapa besar pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode akuntansi.

Menurut Effendi dan Ridho (2021), ukuran perusahaan adalah penilaian besar kecilnya usaha berdasarkan total aset, total penjualan serta tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar totalnya maka ukuran suatu perusahaan semakin besar.

Terdapat tolak ukur yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menilai kecil atau besarnya usaha yang ditentukan melalui kriteria UMKM. Kriteria UMKM berdasarkan jumlah karyawan atau tenaga kerja terdapat 3 jenis yaitu Usaha Mikro yang memiliki karyawan kurang dari 5 orang, Usaha Kecil yang memiliki karyawan 5 - 19 orang dan Usaha Menengah yang memiliki 20 - 99 orang karyawan (Kausar dan Rejeki, 2020)

Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diatur dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut :

- a. Kriteria Usaha Mikro
 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000.
- b. Kriteria Usaha Kecil
 1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 sampai dengan Rp2.500.000.000.
- c. Kriteria Usaha Menengah
 1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 sampai dengan Rp10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 sampai dengan Rp50.000.000.000

2.1.6 Umur Usaha

Umur usaha merupakan lamanya usaha yang didirikan juga menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengatasi kesulitan serta rintangan yang dapat

mengancam keberlangsungan perusahaan sehingga semakin lamanya perusahaan berdiri semakin banyak perusahaan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan investor (Laraswati, Zanaria dan Darmayanti, 2021)

Menurut Amburgey et al. (1993) dan Henderson (1999), dalam Anderson dan Eshima (2011), umur usaha yang lebih panjang memberikan keuntungan dalam hal struktur organisasi dan proses transaksi rutin yang akan mendisiplinkan setiap tindakan perusahaan. Termasuk juga dalam proses pembukuan. UMKM dengan umur lebih panjang yang melakukan pembukuan lebih teratur dianggap memiliki persepsi yang lebih baik terhadap SAK EMKM. (Arda, 2021)

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1	Soraya, E.A. dan Mahmud, A. (2016)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebutuhan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik	X1 = Tingkat pendidikan pemilik X2 = Ukuran usaha X3 = Umur usaha Y = Kebutuhan SAK ETAP	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pemilik dan ukuran usaha berpengaruh terhadap kebutuhan SAK ETAP sedangkan umur usaha tidak berpengaruh terhadap kebutuhan SAK ETAP
2	Tuti, R. dan Dwijayanti, S. P. F. (2016)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman UMKM Dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP	X1 = Pemberian informasi dan sosialisasi X2 = Latar belakang pendidikan X3 = Jenjang pendidikan X4 = Lama usaha X5 = Ukuran usaha Y = Pemahaman UMKM terhadap SAK ETAP	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lama usaha memiliki pengaruh signifikan terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP sedangkan pemberian informasi dan sosialisasi, latar belakang pendidikan, jenjang pendidikan, dan lama usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan.
3	Siswanti, T. dan Suryati, I. (2020)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (SAK EMKM) dalam Penyusunan Laporan Keuangan	X1 = Ukuran perusahaan X2 = Kompetensi SDM Y = Penerapan SAK EMKM	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran usaha dan kompetensi SDM secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAK EMKM.

Tabel 3. (Lanjutan)

		(Studi Kasus pada UMKM Kecamatan Makasar, Jakarta Timur)		
4	Adino, Intan. (2019)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Pelaku Umkm Terhadap Sak Emkm: Survey Pada Umkm Yang Terdaftar Di Dinas Koperasi Dan Ukm Kota Pekanbaru.	X1 = Sosialisasi SAK EMKM X2 = Tingkat pendidikan X3 = Skala usaha X4 = Umur usaha Y = Pemahaman terhadap SAK EMKM	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap pemahaman pelaku UMKM mengenai SAK EMKM sedangkan skala usaha dan umur usaha tidak berpengaruh terhadap pemahaman pelaku UMKM mengenai SAK EMKM
5	Kausar, D. dan Rejeki, D. (2020)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman UMKM Dalam Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM Pada UMKM di Kelurahan Jakasetia	X1 = Informasi dan sosialisasi X2 = Latar belakang pendidikan X3 = Jenjang pendidikan X4 = Lama usaha X5 = Ukuran usaha Y = Pemahaman SAK EMKM	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian informasi dan sosialisasi, latar belakang pendidikan, jenjang pendidikan, lama usaha, ukuran usaha berpengaruh signifikan positif terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM
6	Mutiari, K. N. dan Yudantara, I. G. A. P. (2021)	Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, Sosialisasi, Dan Penerapan Akuntansi Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK EMKM	X1 = Tingkat pendidikan X2 = Pemahaman akuntansi X3 = Sosialisasi X4 = Penerapan akuntansi Y = Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi, sosialisasi dan penerapan akuntansi berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK- EMKM.
7	Novatiani, R. A., Novianto, R. A., dkk. (2022)	Faktor -Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pelaporan Keuangan UMKM Berkualitas (Survei pada UMKM Peternak di Indonesia)	X1 = Pemahaman akuntansi X2 = Kompetensi sumber daya manusia Y= Pelaporan keuangan UMKM berkualitas	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pemahaman akuntansi dan faktor kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi pelaporan keuangan UMKM berkualitas.
8	Wardani, P. dan Hartanto, S. (2022)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan SAK EMKM pada UMKM	X1 = Umur usaha X2 = Jenjang pendidikan X3 = Latar belakang pendidikan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa umur usaha, sosialisasi dan informasi berpengaruh terhadap

Tabel 3. (Lanjutan)

Anggota Danarta	CU	Prima	X4 = Sosialisasi dan informasi Y = Penerapan SAK EMKM	penerapan SAK EMKM, sedangkan jenjang pendidikan dan latar belakang pendidikan tidak berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM
--------------------	----	-------	--	--

2.3 Rumusan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Sosialisasi terhadap Pemahaman Penerapan SAK EMKM

Sosialisasi merupakan proses dalam penerapan laporan keuangan yang membantu UMKM membuat laporan keuangan untuk meningkatkan usahanya, Soekanto (2017) dalam Kausar dan Rejeki (2020). Pemberian informasi dan sosialisasi merupakan metode ataupun cara yang dapat membantu dan memperkenalkan UMKM untuk mengetahui dan memahami mengenai SAK EMKM Apabila pelaku UMKM mendapatkan informasi dan sosialisasi dengan baik, maka pemahaman terhadap SAK akan menjadi lebih baik (Rudiantoro & Siregar, 2012). Sosialisasi berfungsi sebagai cara yang efektif untuk mengenalkan kepada para pelaku UMKM mengenai standar akuntansi yang berlaku saat ini yaitu SAK EMKM. Berdasarkan pengertian tersebut peneliti melihat adanya pengaruh pemberian informasi dan sosialisasi terhadap pemahaman penerapan SAK EMKM di Bandar Lampung, dengan hipotesis sebagai berikut

H₁ : Sosialisasi berpengaruh terhadap pemahaman SAK EMKM

2.3.2 Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Pemahaman Penerapan SAK EMKM

Tingkat pendidikan merupakan suatu tahapan dalam pendidikan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik yang menuju pencapaian dan kemampuan yang dikembangkan (UU No. 20 Tahun 2003). Jalur, jenjang, serta jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Pelaku usaha yang memiliki jenjang pendidikan lebih tinggi diharapkan akan lebih memahami pencatatan akuntansi berdasarkan SAK. Berdasarkan pengertian tersebut peneliti melihat adanya pengaruh jenjang pendidikan terhadap pemahaman penerapan SAK EMKM.

H₂ : Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman SAK EMKM

2.3.3 Pengaruh Skala Usaha terhadap Pemahaman Penerapan SAK EMKM

Skala usaha merupakan ukuran usaha berdasarkan aset perusahaan atau besaran aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar ukuran usaha, perusahaan akan dinilai semakin matang dalam pengelolaan usahanya. Skala usaha berkaitan dengan *growth* atau kebutuhan perkembangan dalam teori ERG. Semakin besar usaha, pencatatan akuntansi yang dibutuhkan akan semakin rumit (Soraya dan Mahmud, 2016). Dibutuhkan pedoman dalam penerapan penyusunan laporan keuangan perusahaan yaitu SAK EMKM. Berdasarkan pengertian tersebut peneliti melihat adanya pengaruh skala usaha terhadap pemahaman penerapan SAK EMKM

H₃ : Skala usaha berpengaruh terhadap pemahaman SAK EMKM

2.3.4 Pengaruh Umur Usaha terhadap Pemahaman Penerapan SAK EMKM

Umur usaha merupakan waktu yang ditempuh usaha sejak didirikan hingga penelitian dilakukan. Umur usaha dapat menentukan tindakan perusahaan dalam menjalankan operasional perusahaannya. Umur usaha dapat ditingkatkan melalui pengelolaan serta pembukuan yang baik dan rapi sesuai standar. Usaha akan terjaga jika pelaku usaha dapat mengetahui perkembangan usahanya melalui pembukuan. Semakin tinggi umur usaha, maka perkembangan usaha akan semakin baik. (Soraya dan Mahmud, 2016). Oleh karena itu, dibutuhkan SAK EMKM sebagai dasar pencatatan akuntansi bagi UMKM. Berdasarkan pengertian tersebut peneliti melihat adanya pengaruh umur usaha terhadap pemahaman penerapan SAK EMKM

H₄ : Umur usaha berpengaruh terhadap pemahaman SAK EMKM